#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-NYA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2023 ini kami mengharapkan adanya masukan berupa saran-saran perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun yang akan datang dapat lebih baik. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Palu, 01 Januari 2024

N MODAL DAN

M. SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si Pembina Utama Madya (IV/D) NIP 197202251992031003

TERPADU SATU PINTU JLAWESI TENGAH

i

# **DAFTAR ISI**

	1	Halaman
KataPe	engantar	i
Daftar	Isi	ii
Daftar	Tabel	iii
Ringka	asan Eksekutif	V
BAB.		
	AHULUAN	1
1.1	Cascading Kinerja	1
1.2	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3	Isu – Isu Strategis	8
1.3.1	Dukungan SDM dan Sarana Prasarana	8
1.3.2	Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	12
BAB.	II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 T	ujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	14
2.2 S	trategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 S	truktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	17
2.4 In	ndikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.5 P	erjanjian Kinerja	20
	III AKUNTABILITAS KINERJA	. 22
3.1	Capaian Kinerja	
3.1.1	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	
3.1.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	
	Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun	
	Terahir	25
3.1.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam	
	Dokumen Perencanaan Strategis Organisisi	. 26
3.1.5	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar	
	Nasional	. 27
3.1.6	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan	
	/Penuruna Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan	29
3.1.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	57
3.1.8	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan	
	Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30
3.2	EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN	. 444
3.3	Inovasi	. 49
3.4	Penghargaan	. 49

Bab. IV PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51

# LAMPIRAN

# **DAFTAR TABEL**

		Halaman
Tabe 11.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.3	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	10
Tabel 1.4	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.5	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan	11
Tabel 1.6	Laporan Hasil Evaluasi	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP	16
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	17
	Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 20	23
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP	20
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	20
Tabel 3.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kiner Tahun Ini	ja 22
Tabel 3.2	Survei IKM Tahun 2023	24
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 – 2023	25
Tabel 3.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisisi	26
Tabel 3.5	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	27
Tabel 3.6	Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2023	29
Tabel 3.7	Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian	30
Tabel 3.8 Tabel 3.9	Kinerja Efisiemasi Penggunaan Sumber Daya Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023	45 46

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2023 berisi laporan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ditunjang capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu nilai realisasi investasi PMDN/PMA, jumlah investor PMDN/PMA Pada Tahun 2023 Realisasi 4943 atau 11,88%, dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98,80% (Sangat Baik) atau 105%. Pada tahun 2023, Realisasi investasi di tahun 2023 mencapai Rp. 111,98 Triliun atau 313.230%.

Indeks Kepuasan Masyarakat pada bulan November sempat dihentikan survei karena terdapat aplikasi baru "SKM ON LINE" oleh Kemenpan, yang melakukan survei tersendiri dalam rangka uji coba aplikasi Kemenpan tersebut. Namun meskipun demikian, nilai IKM DPMPTSP Prov. Sulteng tahun 2023 DPMPTSP dicapai 98,80% dengan predikat Sangat Baik

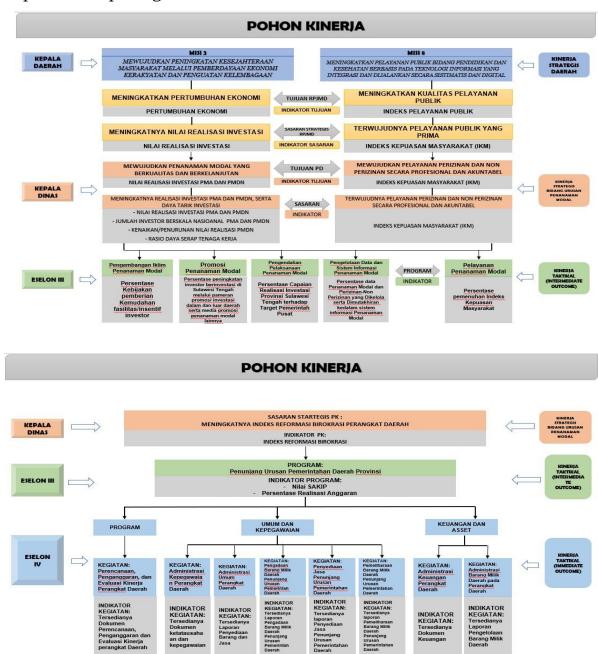
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) yaitu Layanan Investasi Terbaik ke-3 Aplikasi Perizianan SiCantik, Mendapat 2 Penghargaan dari KPPN Palu, Predikat A dalam SAKIP Aword 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi keuangan tahun 2023 adalah Rp. 17.024.144.854,- atau 98,28% dan realisasi fisik 100%.

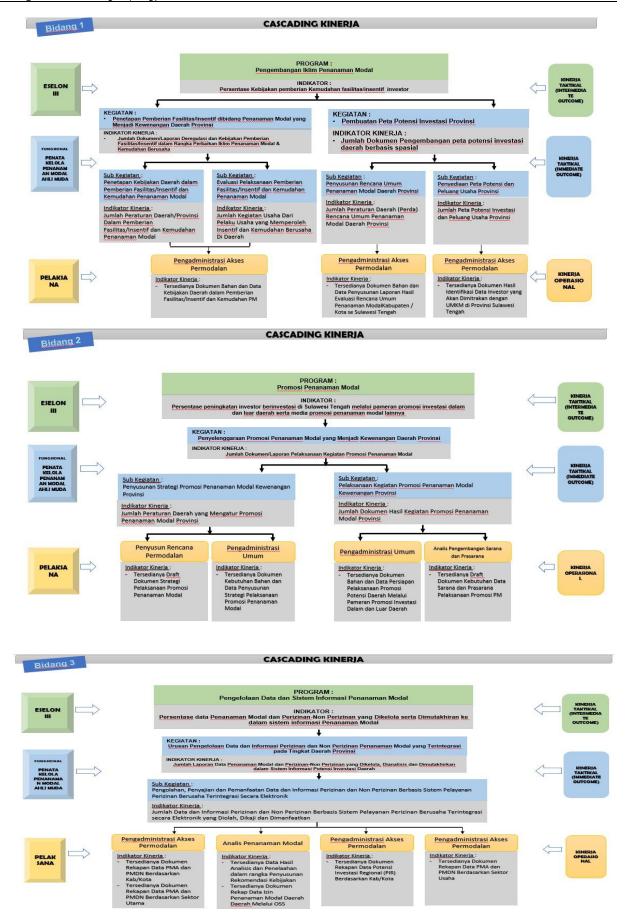
# BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Cascading Kinerja

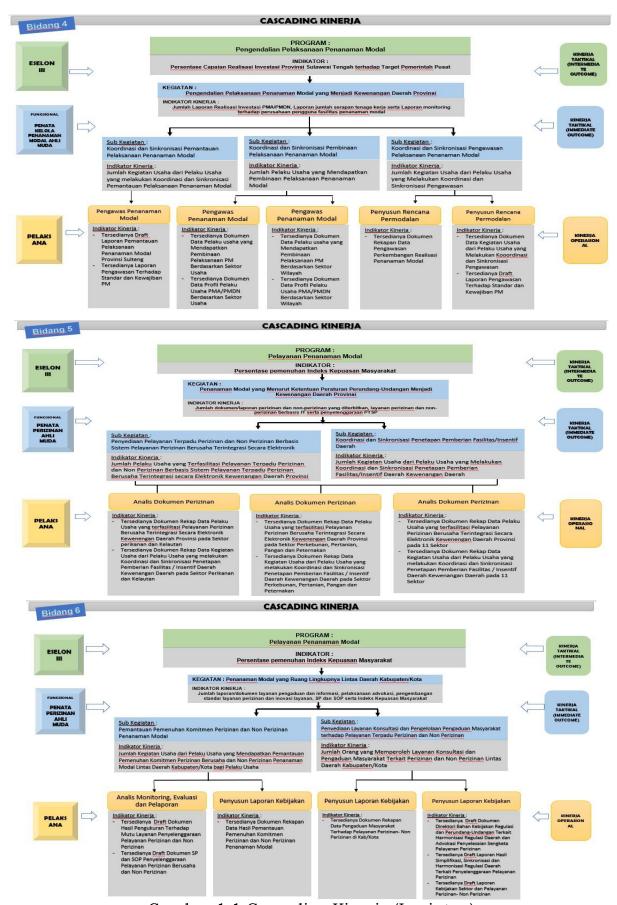
Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal, dari level yamg lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Cascading kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1 Cascading Kinerja



Gambar 1.1 Cascading Kinerja (Lanjutan)



Gambar 1.1 Cascading Kinerja (Lanjutan)

Gambar 1.1 menunjukan penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja dari RPJMD ke Renstra DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Pada cacscading kinerja tersebut dapat dilihat penjabaran misi Gubernur Sulawesi Tengah ke tujuan, sasaran, hingga ke tingkat sub kegiatan yang ada pada DPMPTSP Sulawesi Tengah. Dari cascading kinerja tersebut dapat dilihat keterkaitan capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam pencapaian misi Gubernur Sulawesi Tengah.

### 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :

# A. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Fungsi

 perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

- Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 4. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

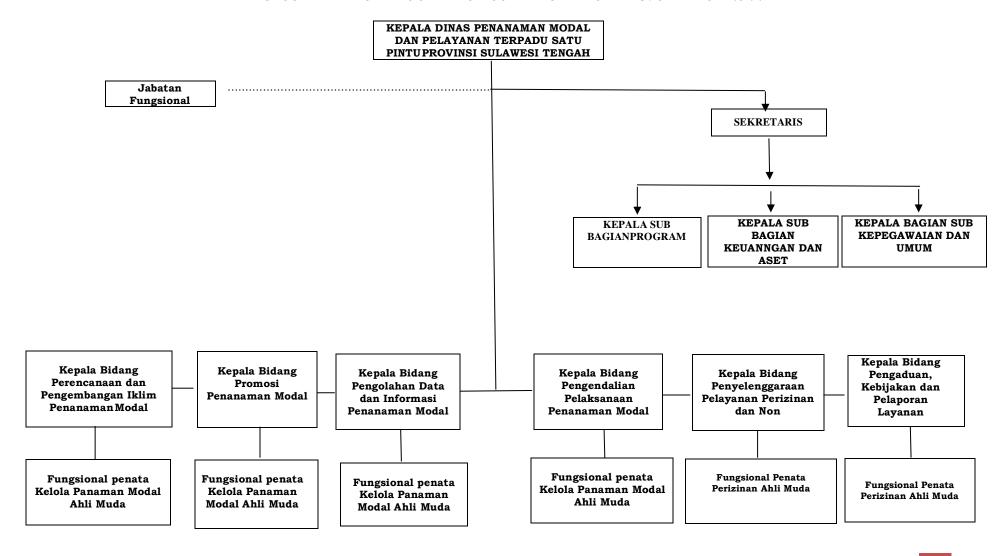
Selanjutnya besaran Oraganisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengahsebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan dan Asset
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
  - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal
  - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal:
  - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal:
  - Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda

- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan Non Perizinan
  - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
- h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah SESUAI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NO. 57 TAHUN 2022



#### 1.3 Isu - Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut diatas, masih banyak masalah bersifat umum yang dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja Tahun 2023 tersebut sebagai berikut:

- 1. Kompetensi sumber daya aparatur DPMPTSP belum seluruhnya memadai.
- 2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum optimal.
- 3. Belum maksimalnya penyelenggaraan even even pameran promosi investasi pasca Covid-19
- 4. Sebagian kabupaten/kota tata ruangnya belum dilegal formalkan sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih dan mempengaruhi investasi di daerah.
- 5. Sebagian kabupaten/kota belum menyusun Rencana Umum Penanaman Modal, yang merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang penanaman modal.
- 6. Sebagaian kabupaten/kota untuk Regulasi kemudahan investasi daerah belum seluruhnya tersedia.
- 7. Kabupaten/kota belum seluruhnya menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis OSS RAB

#### 1.4 Dukungan SDM dan Sarana Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumber daya pegawai dengan komposisi berdasarkan esselonering sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

Eselonering	Jumlah Pegawai
Eselon II	1 Orang
Eselon III	7 Orang
Eselon IV	3 Orang
Staf	89 Orang
Honorer /Tenaga Kontrak	61 Orang
Jumlah	161 Orang

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak 161 orang, terdiri dari Eselon II berjumlah 1 orang, Eselon III berjumlah 7 orang, Eselon IV berjumlah 3 orang, staf berjumlah 89 orang, dan tenaga kontrak/honorer berjumlah 61 orang.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai
Golongan I	0 Orang
Golongan II	5 Orang
Golongan III	38 Orang
Golongan IV	18 Orang
Golongan IX	39 Orang
Non Golongan	61 Orang
Jumlah	161 Orang

Berdasarkan tabel 1.2, pegawai DPMPTSP terdiri dari 39 Orang Golongan IX, 18 orang Golongan IV, 38 orang Golongan III, 5 orang Golongan II, dan 61 orang Non Golongan.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bidang	6 Orang
Kepala Sub Bagian	3 Orang
Pejabat Fungsional	19 Orang
Jumlah	30 Orang

Berdasarkan jabatan (tabel 1.3), pegawai DPMPTSP terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 6 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, dan 19 orang Pejabat Fungsional.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D III	DΙ	SLTA	SMP	SD	Jumlah
1	22	109	4	0	25	0	0	161

Dari tabel 1.4, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPMPTSP yang berpendidikan S3 berjumlah 1 Orang, S2 berjumlah 22 orang, S1 berjumlah 109 orang, DIII berjumlah 4 orang, dan SLTA berjumlah 25 orang.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya bagi aparatur yang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan antara lain pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS).

Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

> Tabel 1.5 Keadaan Inventaris dan Perlengkapan

NO	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	1.575.408.500,00
2	Peralatan dan Mesin	9.749.891.463,00
3	Gedung dan Bangunan	23.554.506.216,00
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	381.777.650,00
5	Aset tetap lainnya	73.298.850,000
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
7	Aset lainnya	1.167.881.900,00
	Jumlah	35.334.882.679,00

Selain sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan rutin, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan Informasi Potensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa:

- a. Mobil Layanan Keliling (Site Mobile Service);

  Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah selain melayani di dalam gedung DPMPTSP juga mengoperasikan mobil layanan keliling (Site Mobile Service).
- b. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mal Pelayanan Publik.

Saat ini DPMPTSP Provinsi sulawesi Tengah telah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP), yang berfungsi untuk penyelenggaran pelayanan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah. (Pergub No. 37 Tahun 2019 Tentang MPP). Keberadaan MPP ini menjadikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemerintah Provinsi ke-dua di Indonesia setelah DKI yang

mempunyai Mal Pelayanan Publik, serta provinsi pertama di Indonesia yang menggabungkan pelayanan dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.

# 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.6 Laporan Hasil Evaluasi

No	Laporan Hasil Ev REKOMENDASI LHE	TINDAK LANJUT		
1.	Dokumen perencanaan kinerja	Dokumen perencanaan kinerja		
1.	dimanfaatkan secara optimal dalam	disusun sesuai dengan mandat		
	penyusunan anggaran dan	disusuri sesuai dengari mandat		
	pengorganisasi kegiatan			
	pengorganiousi neglutari			
2	IKU mampu mengukur kinerja yang	Dalam merumuskan IKU berdasarkan		
	seharusnya dan jumlahnya cukup	target kinerja dari level atas		
	memadai untuk menyimpulkan			
	tercapainya kondisi yang seharusnya			
2	Toward war ditatorilar dalam	Danatanan tangat kinania nagawai		
3	Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja menggambarkan	Penetapan target kinerja pegawai memiliki hubungan keterkaitan dari		
	kinerja dapat dicapai (Achieable)	hasil analisis perbaikan kinerja		
	menantang dan realistis	sebelumnya		
	3 8	J.		
4	Mendokumentasikan keterlibatan	Dokumentasi dalam setiap		
	pimpinan untuk mengambil	monitoring evaluasi yang dilakukan		
	keputusan dalam pengukuran kinerja	pimpinan		
_	N(-1-11	M-1-11		
5	Melakukan monitoring terhadap target kinerja dan tindak lanjut	Melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan		
	terhadap rekomendasi yang diberikan	penyempumaan kmerja ke depan		
	terriadap renomendadi yang diberman			
6	Memberikan reward dan punisment	Melakukan pemantauan terhadap		
	sesuai dengan hasil pencapaian	rencana aksi secara berkala dikaitkan		
	kinerja	dengan pemberian reward dan		
		punisment bila capaian target tidak		
		tercapai atau belum dilakukan		
7	Melakukan pemantauan atas	Pengulauran kineria akan dilakultan		
′	pengukuran capaian kinerja unit	Pengukuran kinerja akan dilakukan secara berkala		
	dibawahnya secara berjenjang	Social Bolkina		
8	Menyusun data hasil pengukuran	Melakukan pemantauan rencana aksi		
	kinerja aksi beserta tindak lanjutnya	untuk pengukuran kinerja		
9	Laporan kinerja menyajikan informasi	Penyusunan laporan kinerja yang		
	tentang analisis efisiensi penggunaan	menyajikan informasi keuangan		
	sumber daya dan keuangan yang	terkait pencapaian sasaran kinerja		
	terkait dengan pencapaian sasaran	instansi		
	kinerja instansi			

10	Pemanfaatan informasi kinerja	Informasi dalam laporan kinerja
	dilengkapi dengan informasi yang	berkala akan disesuaikan dengan
	memadai untuk perbaikan	aktivitas pencapaian kinerja
	perencanaan, perbaikan pelaksanaan	
	program dan kegiatan, perbaikan	
	kinerja dan penilaian kinerja	
11	Melakukan dan mendokumentasikan	Pendokumentasian di setiap evaluasi
	evaluasi atas pelaksanaan rencana	yang dilakukan untuk pelaksaan
	aksi	rencana aksi
10	M 1 1 - 1	N
12	Melakukan pemantauan terhadap	Monitoring dan evaluasi terhadap
	rencana aksi di dokumentasikan,	rencan aksi melalui dokumentasi dan
	ditindaklanjuti dan dilakukan	laporan tindak lanjut
	monitoring secara tertulis	

#### BAB II

#### PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Perencanaan yang dilaksanakan di tahun anggaran 2023 ini adalah perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 serta yang diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.

Dalam dokumen Renstra OPD DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

# "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"

Berdasarkan visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut maka dalam prospektif jangka panjang, pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mememecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan berisi target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

- 1. Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- 2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun). Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta Daya Tarik Investasi
- 2. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel.

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai oleh DPMPTSP disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP

No.	Tujuan	Consen Stratogic Indikator Kinoria		Target Kinerja				
NO.		Tujuan Sasaran Strategis	Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja -	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)		(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Penanaman Modal yang	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	` ' '	33.750.000.000.000	35.750.000.000.000	37.750.000.000.000	39.750.000.000.000	41.750.000.000.000
2	Perizinan dan Non Perizinan secara	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93% (Sangat Baik)	94% (Sangat Baik)	95% (Sangat Baik)	96% (Sangat Baik)	97% (Sangat Baik)

# 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan;
- 2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- 3. Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang investasi;
- 4. Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Arah kebijakan yang ditetapkan dalam mendukung strategi pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan dan meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah;
- 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan

urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi dan lainnya;

- 3. Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah melalui penerbitan regulasi dan penyusunan kajian kawasan investasi baru;
- 4. Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website;
- 5. Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;
- 6. Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas;
- 7. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP

۷I	visi : "Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"						
Mi	Misi III : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan						
Mi	Misi VIII : Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
1)	Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas	- Meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN,	- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan optimalisasi	- Mengembangkan dan meningkatkan SDM aparatur pemerintah daerah			
	dan berkelanjutan	serta Daya Tarik Investasi	ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan.	- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang terkait dengan urusan penanaman modal, utamanya meubeler, wifi dan lainnya.			
			- Menciptakan iklim investasi yang kondusif.	- Menciptakan iklim investasi kondusif yang berkelanjutan di daerah.			
			- Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersediaan data peluang	- Mengembangkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website.			
			investasi.	- Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi.			
			- Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.	- Akselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN maupun non fasilitas.			
2)	Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel	- Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara profesional dan akuntabel	- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal.	- Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT yang berorientasi pada kepuasan pelanggan			

# 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2023 DPMPTSP dilaksanakan melalui 5 (lima) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 14 (empat

belas) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

		ornar bangoung i oncapaan sasar	DPA 2023	DPA 2023	Bertambah/
No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Berkurang
			(Rp)	(Rp)	
		JUMLAH	14.626.285.535	15.306.073.615	679.788.080
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	14.626.285.535	15.306.073.615	679.788.080
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	547.894.554	696.335.854	148.441.300
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	355.836.720	348.972.720	6.864.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	35.203.040	35.203.040	-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	14.707.500	14.707.500	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.877.077	82.803.002	44.925.925
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.270.217	214.649.592	110.379.375
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.413.864.153	9.440.967.514	27.103.361
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.554.141.353	7.554.141.464	111
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.612.320.000	1.585.490.000	26.830.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.707.250	35.707.250	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.968.850	117.065.800	16.096.950
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	51.119.850	47.696.150	3.423.700
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.606.850	100.866.850	41.260.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.348.100	105.414.750	10.066.650
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	95.348.100	105.414.750	10.066.650
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	377.706.843	395.247.343	17.540.500
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	233.699.841	243.412.341	9.712.500
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	55.815.002	95.079.002	39.264.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.192.000	56.756.000	31.436.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.835.663	651.175.013	161.339.350
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.708.969	36.965.798	14.256.829
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.815.321	96.282.846	7.467.525
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378.311.373	517.926.369	139.614.996
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.568.439.590	1.712.188.919	143.749.329
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	834.808.800	944.837.994	110.029.194
		Pengadaan Mebel	201.395.468	219.853.103	18.457.635
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	532.235.322	547.497.822	15.262.500

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 (Lanjutan)

		an Langsung Fencapalan Sasaran Tal	DPA 2023	DPA 2023	Bertambah/
No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Berkurang
			Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.688.274	1.159.610.114	95.921.840
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.554.597	405.701.653	11.852.944
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	646.133.677	753.908.461	107.774.784
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.069.508.358	1.145.134.108	75.625.750
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	333.400.000	336900000	3.500.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.890.000	139.890.000	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	488.704.758	564.230.508	75.525.750
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.513.600	104.113.600	3.400.000
2	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	460.465.950	545.691.450	85.225.500
	serta daya investasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	84.486.650	82.736.65	1.750.000
		Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	42.396.950	40.646.950	1.750.000
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	42.089.700	42.089.700	-
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	375.979.300	462.954.800	86.975.500
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	82.101.600	115.731.350	33.629.750
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	293.877.700	347.223.450	53.345.750
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	473.703.004	546.997.654	73.294.65
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	473.703.004	546.997.654	73.294.650
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	189.044.550	199.528.250	10.483.700
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	284.658.454.284	347.469.404	62.810.950
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.255.079.352	1.315.079.500	60.000.148
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.255.079.352	1.315.079.500	60.000.148
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	189.328.096	249.328.100	60.000.004
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	635.325.457	618.487.700	16.837.757
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	430.425.799	447.263.700	16.873.901
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	215.511.340	265.511.140	49.999.800
		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	215.511.340	265.511.140	49.999.800
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	215.511.340	265.511.140	49.999.800

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023 (Lanjutan)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA 2023 Sebelum Perubahan	DPA 2023 Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		(Rp)	(Rp)	
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	943.618.556	1.294.947.740	351.329.184
Perizinanan Seara Profesional Dan	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	216.880.200	324.948.700	108.068.500
Akuntebel	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	122.013.200	209.334.550	87.321.350
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	94.867.000	115.614.150	20.747.150
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	726.738.356	969.999.040	243.260.684
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	686.738.217	919.999.515	233.261.298
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	40.000.139	49.999.525	9.999.386

Sasaran pertama, Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dilaksanakan melalui 4 (empat) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta daya tarik investasi. Sasaran kedua, Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran tahun 2023 adalah Rp. 17.974.663.737,- dan bertambah sebesar Rp1.050.700.000,- menjadi Rp. 19.025.363.737 pada anggaran perubahan 2023.

Selain program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran, juga dilaksanakan 1 (satu) program pendukung. Program pendukung ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Program pendukung pencapaian sasaran tahun 2023 yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total anggaran Rp. 14.626.285.535,- dan bertambah Rp. 679.788.080,- menjadi Rp. 15.306.073.615,- pada anggaran perubahan 2023.

# 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.4

> Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp90.000.000.000.000
		- Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	3000 Proyek
		- Kenaikan / Penurunan Nilai - Realisasi PMDN	5% (Naik)
		- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7 Orang/Perusahaan
3	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	_ Indeks Kepuasan Masyarakat - (IKM)	94% (Sangat Baik)

# 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahanan tahun 2023

Perjanjian Kinerja perubahan yang ditetapkan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala DPMPTSP disajikan dalam tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-1	-2	-3	-4
1	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	- Indeks Reformasi Birokrasi	64
2	Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp90.000.000.000.000
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	3000 Proyek
		Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	5% (Naik)
		- Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7 Orang/Perusahaan
3	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel	_ Indeks Kepuasan Masyarakat - (IKM)	94% (Sangat Baik)

Perubahan Perjanjian kinerja Tahun 2023 diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

- 1. Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 64
- 2. Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi dengan Indikator Kinerja :
  - Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan target Rp 90.000.000.000.000,
  - Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) dengan target 3000 Proyek,
  - Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan target 5% (Naik),
  - Rasio Daya Serap Tenaga Kerja dengan target 7 Orang/Perusahaan
- 3. Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Profesional dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 94% (Sangat Baik).

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggung jawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

# 3.1 Capaian Kinerja

### a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil/realisasi yang dicapai dengan target/rencana yang tertuang dalam Penetapan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Realiasasi PMA	Jumlah Nilai Realisasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.)	Rp 35.750.000.000.000	Rp. 111.980.000.000.000	313,230 %
	serta Daya Tarik Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	416	4943	11,88 %
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	94% (Sangat Baik)	98,80% (Sangat Baik)	105%

Capaian Indikator Kinerja pada Tabel 3.1 dari indikator nilai realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, serta indeks kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Target investasi pada Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar Rp.35.750.000.000.000,-. Realisasi investasi melebihi target dengan capaian sebesar 313,230 % atau senilai Rp.111,980.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Nilai realisasi investasi PMDN dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMDN Rp. 4.770.000.000,-.
  - Nilai realisasi investasi PMA dapat dicapai dengan total realisasi investasi PMA Rp. 107,210.000.000,-.
- 2. Target jumlah investor berskala nasional yang berinvestasi juga dapat dicapai dengan sangat baik. Berdasarkan data perkembangan investasi tahun 2023, dari target 461 proyek Januari September Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah menerima Laporan Kegiatan Penanaman Modal Perusahaan sebanyak 4.943 Laporan atau mengalami kenaikan sekitar 11,88 % dari Laporan Periode yang sama Pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 2.177 Laporan.
- 3. Hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan DPMPTSP memberikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 98,80%. Hal ini berarti kinerja unit pelayanan DPMPTSP berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam kisaran nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 88,31 100,00. Adapun di TW IV terjadi penurunan yang diakibatkan pada Bulan November sempat dihentikan surveinya karena terdapat aplikasi baru "SKM ON LINE" oleh Kemenpan, yang melakukan survei tersendiri dalam rangka uji coba aplikasi Kemenpan tersebut. Namun meskipun demikian, nilai IKM DPMPTSP Prov. Sulteng tahun 2023 tetap menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah makin meningkat kualitasnya dilihat dari tingginya nilai unsur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

tiap triwulannya, walaupun masih ada unsur SKM yang nilainya relatif rendah. Disamping itu, nilai IKM yang semakin baik tersebut mencerminkan bahwa saat ini dengan adanya kemudahan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha melalui OSS RBA (on line) maka minat masyarakat untuk berusaha semakin meningkat walaupun dimasa endemi Covid-19 saat ini. Untuk lebih jelasnya, hasil survei IKM pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini

Tabel 3.2 Survei IKM Tahun 2023

Keterangan:			No.	UNSUR	NRR
- U1 s/d U9	= Unsur-l	Jnsur Pelayanan	U1	Persyaratan	3,890
-	= Nilai Ra	ta-Rata	U2	Sistem, Mekanisme dan	3,890
- IKM	= Indeks I	Kepuasan	U3	Waktu Penyelesaian	3,900
-	= Jumlah	NRR IKM tertimbang	U4	Biaya/Tarif	3,980
-	= Jumlah	NRR Tertimbang x	U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,890
- NRR Per	= Jumlah	nilai per unsur dibagi	U6	Kompetensi Pelaksana	3,940
	Jumlah	Kuesioner yang	U7	Perilaku Pelaksana	3,920
NRR	= NRR pe	r unsur x	U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan	3,950
per unsur			U9	Sarana dan Prasarana	3,990
IKM UN	IIT PELAYANAN: 98	,80%			
Mutu Pelayanan :					
A (Sangat Baik)	: (3,5324 - 4,00)	88,31 100,00			
<b>B</b> (Baik	: (3,0644 - 3,532)	76,61 - 88,30			
C (Kurang Baik)	: (2,60 - 3,064)	65,00 - 76,60			
<b>D</b> (Tidak	: (1,00 - 0,5996)	25,00 - 64,99			

# b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terahir

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun 2023

	Terbanangan capatan minerja Beberapa Tanan 2020										
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		2021		2022			2023		
	.g ,		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)			(6)	
9		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA)	18.550.510.000.000	42.669.623.790.000	230	33.750.000.000.000	111.182.495.630.000	329	35.750.000.000.000	111.980.000.000.000	313,230%
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	68	425	625	403	2910	722	461	4943	11,88 %
2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,23% - 100%	98%		93%	98,00%	105%	94%	98,80%	105 %

Capaian Menurut tabel diatas Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA) pada tahun 2021 mempunya sebesar target Rp.18.550.510.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.669.623.790.000,dan capaian sebesar 230, sedangkan pada Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) sebesar 68 dengan realisasi sebesar 425 dan Capaian sebesar 625 dan IKM sebesar 98%

Pada Tahun 2022 target Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA) sebesar Rp. 33.750.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.182.495.630.000,- dan capaian sebesar 329, sedangkan pada Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) sebesar 403 dengan realisasi sebesar 2910 dan Capaian sebesar 722, sedangkan target IKM sebesar 93% dengan realisasi sebesar 98,00% dan capaian sebesar 105%.

Pada Tahun 2023 Capaian Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA) pada mempunya target sebesar Rp. 35.750.000.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 111.980.000.000.000,- dan Capaian sebesar 313,230 sedangkan pada target Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek) sebesar 461 dengan realisasi sebesar 4943 dan Capaina sebesar 11,88 pada IKM mempunyai target sebesar 94% dengan realisasi sebesar 98,80% dan capaian sebesar 105

# c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisisi

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisisi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kierja Dengan Target Jangka Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir	Tingkat
NO	Tujuan/Sasaran	mulkator Kinerja	s/d Desember	Renstra 2026	kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MeningkatnyaRealisasi Investasi PMA dan PMDN, serta daya tarik investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA)	111.980.000.000.000	41.750.000.000.000	2680,215
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	4943	635	778,425
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,80%	97%	102

Dari table diatas memperlihatkan bahwa realisasi investasi sampai pada tahun 2023 mencapai Rp. 111.980.000.000.000.- Jumlah proyek investor berskala nasional pada tahun 2023 dengan capaian 4943. Kualitas pelayanan yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memenuhi target dengan kategori sangat baik.

# d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Pada tahun 2023 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menargetkan realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar yaitu Rp. 1.099,8 Triliun. Target tersebut dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP dengan jumlah realisasi investasi sebesar Rp. 111,89 Triliun atau 313,230% pada Tahun 2023

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain

No	Tujuan/Sasaran	3 ,		Terget Standar Nasional/Provinsi	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	MeningkatnyaRealisasi Investasi PMA dan (F	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Bersekala (PMDN/PMA)	111.680.000.000.000	111.980.000.000.000	99,73
1	PMDN, serta daya tarik investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)	4943	635	778,425
2	Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,80%	97%	102

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penuruna Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 adalah:

- Semangat disiplin serta kerjasama yang baik serta komitmen bersama di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai rencana.
- 2. Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku.
- 3. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi teknis lainnya baik di daerah maupun di pusat dalam mendukung pelaksanaan program.
- Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik 4. dan berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja.
- 5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan kegiatan.
- Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha 6. dalam merealisasikan investasinya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mengurangi kendala/hambatan dalam pencapaian kinerja, maka diambil langkah-langkah dan tindak lanjut sebagai berikut :

- Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap 1. pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya.
- 2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan komprehensif.

- 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terutama pada jajaran pemerintah daerah dalam penyelesaian berbagai kebijakan dan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
- 4. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah.
- 5. Memelihara sarana dan prasarana yang telah ada serta merencanakan pengadaan sarana pendukung lainnya di tahun berikutnya.
- 6. Pemanfaatan secara maksimal Mal Pelayanan Publik.

# f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian pernyataan kinerja diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut akan disajikan data capaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2023

Tabel 3.6 Efisiensi Sumber Daya Dan Realisasi Anggaran 2023

		Ir	ndikator Kinerj	ja	pagu Aı	nggaran	Tingkat
Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	anggaran	Realisasi	Efisiensi (5-8)
1	2	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah PROVINSI	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64%	79.64%	124%	17.998.081.043	16.785.686.022	16.785.685.942
Meningkatnya Realisasi	Program Pengembangan Iklim	91%	91%	100%	545.691.450	534.023.470	534.023.370
Investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi	Program Promosi Penanaman Modal	52%	192,90%	371%	546.997.654	522.504.478	522.504.107
	Program Pengendali Palaksanaan Penanaman Modal	100%	100,27%	748%	1.315.079.500	1.187.777.924	1.187.777.176
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	91%	91%	100%	265.511.140	257.996.090	257.995.989
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Program Pelayanan Penanaman Modal	94%	98,80%	104%	1.046.010.378	973.237.697	973.237.593

# g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.7 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

			Kınerja	L					
Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan		Target	I	Realisasi	Capaian	
Program/ Regiatan	Sasaran Kinerja	mukator Killerja	Satuan	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi
1	2	3	4	5		6	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah PROVINSI	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	64	15,166,458,619	79,64	13,548,603,977	124%	"89%
Program Pengembangan Iklim	Meningkatnya Realiasasi Investasi PMA dam PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Kebijakan Pemberian Kemudahan Fasilitas/Insentif Investor	%	91	545,691.450	91	487,237,806	100%	98%
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Realiasasi Investasi PMA dam PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Peningkatan Investor Berinvestasi Di Sulawesi Tengah Melalui Pameran Promosi Investasi Dalam Dan Luar Daerah Serta Media Promosi Penanaman Modal lainnya	%	52	546.997.654	192,9	522,504,487	317%	96
Program Pengendali Palaksanaan Penanaman Modal	Meningkatnya Realiasasi Investasi PMA dam PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Target Pemerintah Pusat	%	100	1.315.079.500	100,27	1.315.079.500	100,27	90%
Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Realiasasi Investasi PMA dam PMDN Sera Daya Tarik Investasi	Presentase Data Penenaman Modal Dan Perizinan Non Perizinan Yang Dikelola Serta Dimutahirkan Kedalam Sistem Informasi Penanaman Modal	%	91	265,511,140	91%	257,996,090	100%	97%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya Pelayanan Peizinan Dan Nonperizinan Secara Profesional Dan Akuntabel	Presentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	%	94	1.046.010.378	98,80%	668.056.712	104%	93%

### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah PROVINSI

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan indicator Program yaitu penunjang urusan daerah Provinsi dan indicator program yaitu Nilai SAKIP dan presentasi Realisasi Anggaran. Dengan kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasli Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Dearah, Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerinth daerah, Pemeliharaan barang milik daearah penunjang urusan pemerintah Daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daearah dan mempunyai indicator kinerja yaitu Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, tersedianya ketatausahaan dokumen kepegawaian, tersedianyan laporan barang dan jasa, tersedianya laporang pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya dokumen keuangan, Tersedianya laporan pengelolaan barang milik daerah. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 17.998.081.043,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.785.686.022,- atau 124%.

# II. Program Pengembangan Iklim

Dalam rangka mewujudkan realisasi investasi di daerah Sulawesi Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah, mengambil peran yang strategis dengan cara mengkaji dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai sasaran strategis yaitu meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi. Indikator dari program ini yaitu persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insentif investor.

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikam 91% dengan keluaran berupa 1 (satu) laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 545,691.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 487,237,806,- atau 98%.

Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 2 (dua) kegiatan, pertama kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi,

dan kedua adalah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi. Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas 2 sub kegiatan.

## 1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Kegiatan Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha.

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikam 100% dengan keluaran berupa 1 (satu) laporan Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 83,736,650,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.351.650,- atau 99.53%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman dan (b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

#### a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal mempunyai indikator kinerja yaitu Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Sub kegiatan ini menitikberatkan pada penyusunan RAPERGUB Sulawesi Tengah tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan target kinerja 1 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga capaiannya 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 40,646,950,- dengan realisasi Rp. 40.646.950,atau 100%.

## b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Target indikator sub kegiatan ini dapat direalisasikan 91%, dimana dalam sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal terdapat 1 kegiatan usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 42.089.700,-dengan realisasi Rp. 41.704.700,- atau 99%.

### 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi ini mempunyai indikator kegiatan yaitu jumlah dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial. Target kegiatan ini dapat dicapai 100%, dimana dalam kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dihasilkan 1 (satu) dokumen pengembangan peta potensi investasi daerah berbasis spasial. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 462,954,800,- dengan realisasi Rp. 462,236,200,- atau 99.84%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, dan (b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

## a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi mempunyai indikator yaitu Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Desk Penyusunan RUPM bagi kabupaten/kota dan melaksanakan FGD Penyusunan Perencanaan Kawasan Investasi UMKM, Regulasi, dan Kemitraan Usaha kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat dicapai 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp.115.731.350,- dengan realisasi Rp. 114.875.664,- atau 99%.

### b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi.

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Evaluasi Kemitraan Usaha antara UMKM dan Investor kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat dicapai 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 347.223.450,- dengan realisasi Rp. 336.796.156,- atau 97%.

#### II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal adalah program yang mengkaji dan menghasilkan pemahaman yang sinergi serta peningkatan kualitas dalam melakukan promosi penanaman modal. Program ini mempunyai sasaran strategis yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator yaitu persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya.

Pada bulan Januari – Desember 2023 tercatat jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan sebanyak 40,132. Jumlah ini meningkat sangat signifikan dibandingkan NIB yang terbit di tahun 2022 sebanyak 17.156. Peningkatan investor yang berinvestasi di Sulawesi Tengah dapat direalisasikan sebesar 193%. Dengan demikian indikator program Promosi Penanaman Modal dapat dicapai sebesar 371%. Pagu anggaran program ini pada T.A. 2023 Rp. 546.997.654,- dengan realisasi sebesar Rp. 522,504,487,- atau 96%.

Program promosi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dan kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

## 1. Kegiatan Penyelenggraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memiliki Indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal.

Target indikator kegiatan yaitu 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 546.997.654,- dengan realisasi sebesar Rp. 522.504.487,- atau 96%.

Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu (a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi; dan (b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

## a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi memiliki Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi. Kemudian. Pelaksanaan sub kegiatan ini pada tahun 2023 berupa pendampingan pembuatan video potensi unggulan di kabupaten Morowali Utara, Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una. Target indikator sub kegiatan dapat dicapai 100%. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A 2023 sebesar Rp199.528.250,- dengan realisasi sebesar Rp 198.014.250,- atau 99%.

## b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi substansinya adalah mengikuti dan melaksanakan pameran dalam dan luar daerah yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana pameran. Indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi.

Event pameran luar daerah yang diikuti DPMPTSP selama tahun 2023 yaitu Kalsel Expo, Batu Malang Tourism and Trade Investmen Expo (BTTIE), dan Jakarta Fair Kemayoran. Untuk event dalam daerah yang diikuti yaitu Festival Danau Poso. Selain itu, DPMPTSP juga berpartisipasi

dalam event luar negeri pada Dubai Expo 2023. Target indikator sub kegiatan yaitu 1 (satu) dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi, dengan realisasi jumlah laporan yang dibuat sebanyak 1 (satu) laporan, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 347.469.404,- dengan realisasi sebesar Rp. 324.490.237,- atau 93%.

#### III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan dan perizinan penanaman modal. Sasaran strategisnya adalah Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel. Indikator program ini adalah Persentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Program ini mempunyai target indikator persentase pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 94%. Survei Kepuasaan Masyarakat yang dilakukan DPMPTSP pada tahun 2023 memberikan hasil IKM 98,80%, sehingga capaian indikator program ini adalah 104%, Adapun di TW IV terjadi penurunan yang diakibatkan pada Bulan November sempat dihentikan surveinya karena terdapat aplikasi baru "SKM ON LINE" oleh Kemenpan, yang melakukan survei tersendiri dalam rangka uji coba aplikasi Kemenpan tersebut. Pagu anggaran program ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 1,046,010,378,- dengan realisasi sebesar Rp. 668.056.712,- atau 93 %.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan (2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi. Kedua kegiatan tersebut masing-masing terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.

# 1. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Target indikator kegiatan berupa jumlah laporan/dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 5 (satu) dokumen/laporan dapat dipenuhi, sehingga capaian kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 326,725,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 305,180,985,- atau 93%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dan (2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

### a. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dilaksanakan dengan melakukan evaluasi pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota bagi pelaku usaha.

Sub kegiatan ini memiliki target 1500 kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas daerah kabupaten/kota, dan dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sebanyak 23370 kegiatan usaha. Sehingga capaian indikator sub kegiatan ini adalah 1558%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 166,722,200,- dengan realisasi sebesar Rp. 148.556.205,- atau 89%.

## b. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Target indikator sub kegiatan yaitu 7 orang atau perusahaan yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota. Dalam realisasinya hanya 4 orang atau perusahaan yang mengajukan pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan semakin baik sehingga semakin sedikit pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Dengan demikian target indikator sub kegiatan ini dapat terealisasi dengan capaian 1686%. Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A. 2023 sebesar Rp. 160,002,800,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 156,624,780,- atau 98%.

# 2. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT. Indikator kegiatan ini adalah jumlah dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP. Target indikator kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP dapat direalisasikan sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%.Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 719,285,378,- dengan realisasi sebesar Rp. 668,056,172,- atau 93%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

## a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan usaha dengan aplikasi/berbasis IT, diantaranya dengan melaksanakan workshop OSS bagi pelaku usaha UMK dan Non UMK. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 3911 pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan provinsi. Target ini dapat terealisasi dengan jumlah pelaku usaha yang mendapat layanan sebanyak 4.675 pelaku usaha, sehingga capaian indikator sub kegiatan ini adalah 120%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2023 sebesar Rp. 695,269,239,-dengan realisasi sebesar Rp. 647,893,032,- atau 93%.

# b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah memiliki indikator memiliki indikator yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 17.656 kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Target ini dapat terealisasi sebanyak 19.286 kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini yaitu 109%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp.24,016,139,- dengan realisasi sebesar Rp. 20,163,680,- atau 84%.

#### IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator program yaitu Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Target Pemerintah Pusat.

Target indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 100% mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2023, Kementerian Investasi (BKPM) menetapkan target realisasi investasi untuk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 111,18 Triliun. target ini dapat dicapai dengan realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023 sebesar Rp. 111,98 Triliun. Sehingga capaian indikator program sampai adalah 7487%. Pagu anggaran program pada T.A. dengan 2023 sebesar Rp. 1,315,079,500,realisasi sebesar Rp. 1,187,779,124,- atau 90%.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan.

## 1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan melakukan fungsi pemantauan, pembinaan, pengendalian pelakasanaan penanaman modal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal.

Target indikator kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenagan Daerah Provinsi yaitu 1 (satu) laporan realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas penanaman modal. Jumlah realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2023 adalah Rp.111.980 Triliun dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang

terserap sebanyak 4943 orang. Capaian indikator kegiatan adalah 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar sebesar Rp.1,315,079,500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,187,779,124,- atau 90%.

Kegiatan ini mempunyai 3 sub kegiatan yaitu (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; (2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

## a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 4 kegiatan usaha yang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2023 sebesar Rp. 249,328,100,-dengan realisasi sebesar Rp. 217,171,524,- atau 87%.

## b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis perizinan/pengaawasan berusaha berbasis risiko serta penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

Target indikator sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 370 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 130%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada

T.A. 2023 sebesar Rp. 618,487,700,- dengan realisasi sebesar Rp. 566,141,500,- atau 98%.

## c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki indikator yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan.

Target indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 28 kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp.447,263,700,- dengan realisasi sebesar Rp. 404,466,100,- atau 90%.

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp. 13.911.100,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.472.600,- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 14.625.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.675.000,- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp. 31.200.000,- Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 344.730.000,-dengan sisa anggaran sebesar Rp, 24.650.000

## V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah program yang menyediakan data laporan penanaman modal dan data perizinan non perizinan beserta informasi penanaman modal. Sasarannya adalah Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini memiliki indikator yaitu persentase data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola serta dimutakhiran ke dalam sistem informasi penanaman modal.

Indikator program ini menargetkan sebanyak 91% data penanaman modal dan perizinan-non perizinan dikelola dan dimutakhiran ke dalam

sistem informasi penanaman modal. Data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola dan dimutakhiran ke dalam sistem informasi penanaman modal pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebanyak 91%, sehingga capaian indikator program ini adalah 100%. Pagu anggaran program pada T.A. 2023 sebesar Rp. 265,511,140,- dengan realisasi sebesar Rp. 257,996,090,- atau 97%.

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan.

## 1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi ini dilaksanakan dengan melakukan analisis dan evaluasi data, yang terintegrasi dalam satu basis data. Indikator kegiatan adalah jumlah laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah.

Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) Potensi Investasi Regional (PIR) untuk mendukung capaian indikator kegiatan. Sebagai hasilnya disusun 1 (satu) laporan data penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah. Sehingga capaian indikator kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2023 sebesar Rp. 265,511,140,- dengan realisasi sebesar Rp. 257,996,090,- atau 97%.

Kegiatan ini mempunyai 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

## a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan dengan menitikberatkan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) dalam rangka perbaruan (*updating*) data investasi. Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

Indikator sub kegiatan ini menargetkan 1 (satu) dokumen yang berisi data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Data tersebut disusun dalam bentuk Direktori PMA/PMDN Tahun 2023. Dengan demikian capaian indikator sub kegiatan ini adalah 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2023 sebesar Rp. 447,263,700,- dengan realisasi sebesar Rp. 257,996,090,- atau 97%.

#### 3.2 EFISIENSI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP dilaksanakan melalui 5 program. Sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi dilaksanakan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sementara sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran

keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, atau dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n} (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan rumus yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Efisiemasi Penggunaan Sumber Daya

Their 10	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				pagu Anggaran		Capaian Kinerja X	7. 0
Tujuan/Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran (5X6)	7 - 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta daya tarik investasi	Program Pengembangan Iklim	Presentase Kebijakan Pemberian Kemudahan fasilitas/Insentif investor	91%	91%	100%	545.691.450	534.023.470	545.691.450	11.667.980
	Program Promosi Penanaman Modal	Presentase Peningkatan Investor Berinvestasi di Sulawesi tengah Melalui Pameran Promosi Investasi Dalam dan Luar Daerah Serta Media Promosi Penanaman Modal lainnya	52%	192,9%	371%	546.997.654	522.504.478	2.029.361.296	24.493.176
	Program Pengendali Palaksanaan Penanaman Modal	Presentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Target Pemerintah Pusat	100%	100,27%	7487%	1.315.079.500	118.777.924	98.460.002.165	1.196.301.576
	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Presentase Data Penanaman Modal dan Perizinan Non Perizinan yang Dikelola Serta Dimutahirkan ke Dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	91%	91%	100%	265.511.140	257.996.090	265.511.140	7.515.050
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel	Program Pelayanan Penanaman Modal	Presentase Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat	94%	98,80%	104%	1.046.010.378	973.237.697	1.087.850.793	72.772.681

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.8, maka diperoleh nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan, total anggaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar Rp. 19.025.363.737,-. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.808.181.464,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.1843. 598.604,- dan Belanja Modal Rp. 2.033.583.669,- Belanja Pegawai dapat direalisasi sebesar Rp. 6.739.619.705,- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 8.816.890.749,- dan Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 1.999.433.934,-.. Sehingga total anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2023 dapat terealisasi sebesar Rp. 17.024.144.854,-. Realisasi keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9 Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023

Nomor	URAIAN	Total Pagu	Realisasi Ke		Realisasi Fisik	SILFA	
Nomor	URAIAN	Total Pagu	Rp	%	%	Rp	
02:18:01	Program Penununjang Urusan Pemerintah Daerah	15,166,458,619 13,548,603,977		89%	100%	1,210,093,810	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	696,335,854	644,313,482	93%	100%	49,822,372	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	348,972,720	310,961,818	89%	100%	38,010,902	
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	35,203,040	35,147,040	100%	100%	56	
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	14,707,500	14,541,250	99%	100%	166,25	
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82,803,002	80,679,742	97%	100%	2,123,260	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214,649,592	202,983,632	95%	100%	9,465,960	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,440,967,514	7,978,488,228	85%	100%	1,072,494,739	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,554,141,464	6,095,595,158	81%	100%	1,068,561,759	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,585,490,000	1,584,490,000	100%	100%	1,000,000	
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35,707,250	35,605,250	100%	100%	102	
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	117,065,800	115,262,520	98%	100%	1,803,280	
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	47,696,150	47,473,450	100%	100%	222,7	
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100,866,850	100,061,850	99%	100%	805	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105,414,750	103,989,150	99%	100%	1,425,600	
2.18.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	105,414,750	103,989,150	99%	100%	1,425,600	

Tabel 3.9
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2023 (Lanjutan)

Nom: ==	V D A V A W	Total Dame	Realisasi Ke	euangan	Realisasi Fisik	SILFA
Nomor	URAIAN	Total Pagu	Rp	%	%	Rp
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	545.691.450	487.237.806	98%	100%	11.667.980
02.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	82.736.650	82.351.650	1005	100%	385.000
02.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	40.646.950	40.646.950	100%	100%	0
02.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	42.089.700	41.704.700	99%	100%	385.000
02.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	462.954.800	404.886.156	98%	100%	11.282.980
02.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	115.731.350	68.090.000	99%	100%	855.686
02.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	347.223.450	336.796.156	97%	100%	10.427.294
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	546,997,654	522,504,487	96%	100%	24,493,167
02.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Provinsi	546,997,654	522,504,487	96%	100%	24,493,167
02.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	199,528,250	198,014,250	100%	100%	1,514,000
02.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	347,469,404	324,490,237	100%	100%	22,979,167
02.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	326,725,000	305.081.030	93%	100%	21,544,015
02.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	166,722,200	148.556.250	89%	100%	18,165,995
02.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	160,002,800	156.524.780	98%	100%	3,378,020
02.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	719,285,378	668,056,712	93%	100%	51,228,666
02.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	695,269,239	647,893,032	93%	100%	47376207
02.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	24,016,139	20,163,680	84%	100%	3,852,459

Sisa anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.465.749.345,atau dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Sisa belanja Gaji Pegawai/Tambahan Penghasilan sebesar Rp.1.068.561.759,-
- 2. Sisa belanja barang jasa sebesar Rp. 366.707.855,-
- 3. Sisa belanja modal hasil negosiasi harga sebesar Rp. 34.149.735,-

#### 3.3 INOVASI

Pada tahun 2023 tidak ada inovasi baru yang dikembangkan. Hal yang dilakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam bekerja.

#### 3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui DPMPTSP yang diperoleh pada tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Terbaik 3 pada Awording Kontributor terbaik dalam Implementyasi Aplikasi Perizianan SiCantik Cloud Tingkat Pemerintah Provinsei Sulawesi Tengah 2023 Rapat koordinasi Nasional Urusan E-Government/system Pemerintahan Berabasis Elektronik (SPBE)
- 2. Mendapat 2 Penghargaan dari KPPN Palu, yaitu
  - a. Sebagai "Satker DKTP Terbaik Pertama" dengan Capaian IKPA Sangat Baik (nilai 95,7) TW III
  - b. Sebagai "Satker dengan IKPA Terbaik ke 2 pada kategori Satker DKTP Semester I tahhun 2023
- 3. Predikat A dalam SAKIP Aword 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

### BAB IV PE N U T U P

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, sebagai berikut:

- Target Indikator Kinerja DPMPTSP pada tahun 2023 dapat dicapai dengan baik, dengan capaian melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- 2. Realisasi investasi di tahun 2023 mencapai Rp. 111,68 Triliun atau 313.230% dari total target Rp. 111,18 Triliun
- 3. Pada Indeks Kepuasan Masyarakat bulan November sempat dihentikan survei karena terdapat aplikasi baru "SKM ON LINE" oleh Kemenpan, yang melakukan survei tersendiri dalam rangka uji coba aplikasi Kemenpan tersebut. Namun meskipun demikian, nilai IKM DPMPTSP Prov. Sulteng tahun 2023 DPMPTSP dicapai 98,80% dengan predikat Sangat Baik.
- 4. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan DPMPTSP dalam pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 adalah 89,601 %
- 5. Realisasi keuangan tahun 2023 adalah Rp. 17.024.144.854,- atau 98,28% dan realisasi fisik 100%.
- 6. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) yaitu Layanan Investasi Terbaik ke-3 Aplikasi Perizianan SiCantik, Mendapat 2 Penghargaan dari KPPN Palu, Predikat A dalam SAKIP Aword 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

#### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam rangka perbaikan penyusunan rencana kinerja di tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut:

- Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Bidang Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- 2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan secara efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dana.
- 3. Perlu adanya ketepatan dalam penentuan indikator dan target kinerja dari masing-masing kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan DPMPTSP T.A. 2023 dan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Palu, 01 Januari 2024

AMAN MODAL DAN

Pembina Utama Madya (IV/D) NIP 197202251992031003

TERPADU SATU PINTU